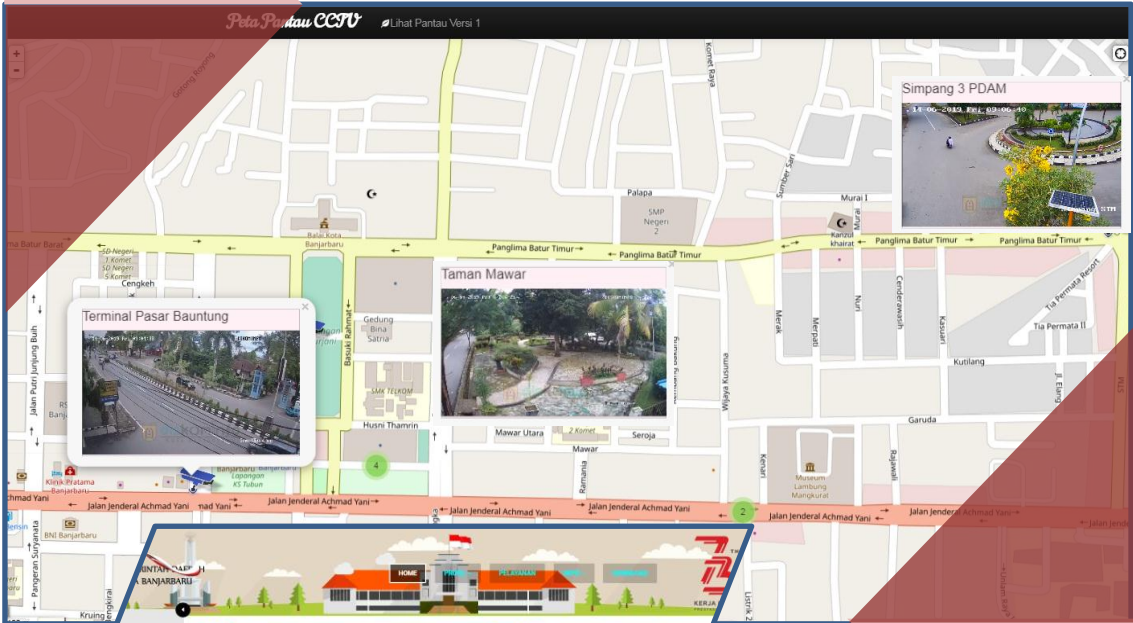


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Diskominfo) disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Diskominfo Banjarbaru sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalam Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskominfo Banjarbaru merupakan implementasi indikator-indikator kinerja di bidang Komunikasi dan Informatika.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja (LKj) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang. Dengan memperhatikan hasil kinerja di bidang Komunikasi dan Informatika diharapkan laporan ini bisa memberikan masukan bagi penyusunan rencana kegiatan dan peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa mendatang yang berorientasi pada pencapaian visi Diskominfo Banjarbaru yaitu “Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Menggunakan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi Yang HARAT (Handal, Aman, Responsif Dan Terintegrasi)”

Banjarbaru, Februari 2019

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru,**

JOHAN ARIFIN, AP, MM

NIP. 19750328 199501 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Amanat Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021, menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru bertanggung jawab melaksanakan misi keempat pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang tujuannya adalah : **“Melaksanakan Reformasi Birokrasi Yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Teknologi Informasi”**.

Lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 tahun 2016 Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi Dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru, sebagai salah satu Perangkat Kerja Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru melalui rumusan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu : **“Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Menggunakan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi Yang Harat (Handal, Aman, Responsif Dan Terintegrasi)”**.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dapat berjalan dengan baik, maka disusunlah misi sbb :

- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah menggunakan TIK
- Meningkatnya konektivitas penyelenggaraan pemerintah menggunakan TIK
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah menggunakan TIK.
- Meningkatnya kualitas layanan Informasi publik.

Sebagai penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang akan diambil, maka di tahun 2018 ada 11 Program yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK
6. Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah
7. Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

8. program pengembangan data/informasi
9. Program Pengembangan Persandian Nasional
10. Program layanan penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah
11. Program layanan Peningkatan kualitas layanan publik Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan TIK

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sebagai SKPD yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, maka tahun 2018 merupakan tahun kedua bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam membuktikan kinerjanya.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, serapan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2018 sebesar 93,60% atau **Rp 10,932,392,625.81** dari **Rp 11,679,662,280** dana yang tersedia.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan masih terdapat kendala yang tentunya merupakan tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru ke depannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Struktur Organisasi	4
1.5. Fungsi dan Tugas	5
1.6. Keadaan Pegawai.....	6
1.7. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	7
1.8. Keuangan	8
1.9. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1. Perencanaan Strategis	10
2.2. Perjanjian Kinerja 2018.....	17
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2018	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018.....	21
3.2. Akuntabilitas Anggaran	33
BAB IV PENUTUP.....	37
4.1. Kesimpulan	37
4.2. Kendala dan Solusi	38
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018.....	6
Tabel 1.2.	Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018	7
Tabel 1.3.	Rincian Anggaran dan Realisasi APBD.....	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	12
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018	18
Tabel 2.3.	Alokasi Anggaran.....	19
Tabel 3.1.	Target dan Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	21
Tabel 3.2.	Jumlah Pengunggahan pada Aplikasi SIP-PPID	30
Tabel 3.3.	Realisasi Kinerja dan Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis.....	34
Tabel 3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun 2018.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	5
Gambar 3.1.	Grafik Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR! Berdasarkan Topik Laporan	26
Gambar 3.2.	Grafik Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR! Berdasarkan Unit Terlapor	26
Gambar 3.3.	Grafik Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR! Berdasarkan Sumber Laporan	27
Gambar 3.4	KIM Kampung Purun.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I berisi :

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar Hukum
4. Struktur Organisasi
5. Fungsi dan Tugas
6. Keadaan Pegawai
7. Keadaan Sarana dan Prasarana
8. Sistematika Penulisan

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru diatur melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Kinerja instansi yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) dibuat dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip *Good Governance*, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *Public Good and service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai salah satu sarana yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 serta memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen dengan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 adalah :

1. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 50 tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
15. Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

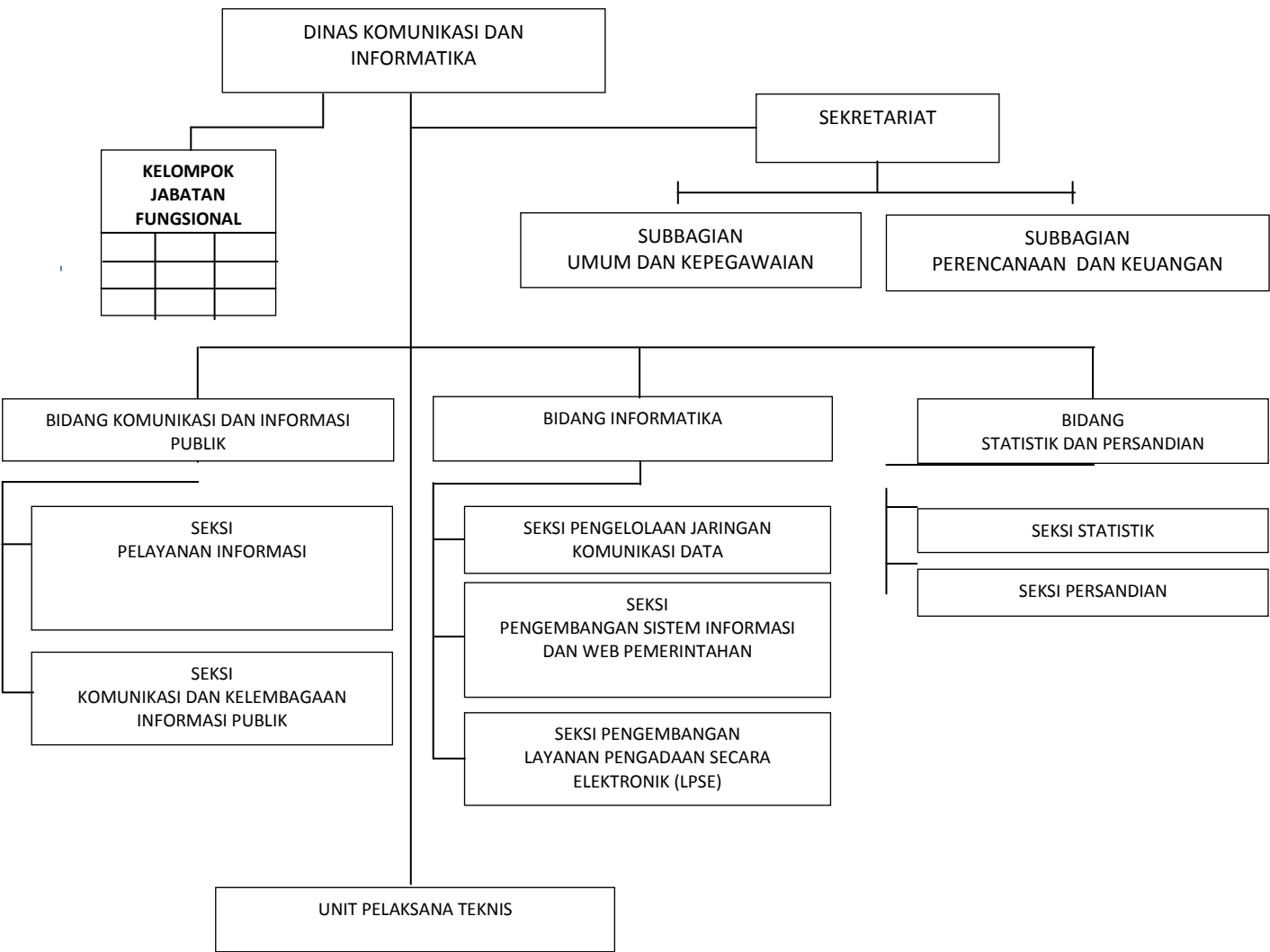
1.4. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Atas dasar hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 64 tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru. Berdasarkan peraturan tersebut, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Informasi.
 - b. Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik
3. Bidang Informatika, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasidan Web Pemerintahan
 - c. Seksi Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
4. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi;
 - a. Seksi Statistik;
 - b. Seksi Persandian;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah sbb :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

1.5. Fungsi dan Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Statistik dan Persandian.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika.
- e. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.6. Keadaan Pegawai

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru didukung oleh 48 orang pegawai, dengan rincian sbb:

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	35 orang
Pegawai Tidak Tetap (PTT)	:	1 orang
Tenaga Kontrak	:	12 orang
Dengan posisi / jabatan sebagai berikut:		
Kepala Dinas (ess. IIb)	:	1 orang
Sekretaris Dinas (ess. IIIa)	:	1 orang
Kabid (ess. IIIb)	:	3 orang
Kasi/Kasubbag (ess. IVa)	:	9 orang
Pejabat Fungsional (Pranata komputer)	:	7 orang
Staf PNS / PTT / Tenaga Kontrak	:	27 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan									
SD	SMP	SMA	DI	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	-	6		4	-	20	5	-	35

Jumlah PTT dan Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan									
SD	SMP	SMA	DI	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	-	2	1	2	-	8	-	-	13

Jumlah PNS Menurut Golongan/Kepangkatan																			
Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV				
A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh
							4	1		7	7	8	4		2	2			
																			35

Jumlah PNS Menurut Gender				Jumlah	
PNS		PTT dan Tenaga Kontrak			
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
18	17	9	4	27	21

1.7. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada tahun 2018 adalah sbb :

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru Tahun 2018

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan roda 4	2 buah	
2	Kendaraan roda 2	10 buah	3 mutasi dari dishub
3	Lemari	4 buah	
4	Meja	132 buah	
5	Laptop	3 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
6	UPS	24 buah	21 Mutasi dari bagian pembangunan, 3 mutasi dari dishub
7	Harddisk eksternal	3 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
8	Router	4 buah	3 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dishub
9	Switch Hub	5 buah	4 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dishub
10	Batteray charger	4 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
11	PC	21 buah	18 Mutasi dari bagian pembangunan, 3 mutasi dari dishub
12	Server	5 buah	4 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dishub
13	Meja rapat	6 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
14	Kursi rapat	14 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
15	Kursi tamu	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
16	AC split	13 buah	1 Mutasi dari bagian pembangunan, 12 mutasi dari dishub
17	Printer	3 buah	2 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dishub
18	Camera film	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
19	Wireless access point	2 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
20	Peralatan jaringan lain-lain	10 buah	1 Mutasi dari bagian pembangunan, 9 mutasi dishub
21	Peralatan listrik	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
22	Tool kit boks	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
23	Alat pemadam portable	2 buah	1 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dari dishub
24	Harddisk internal	3 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
25	Memory	5 buah	3 Mutasi dari bagian pembangunan, 2 mutasi dishub
26	Clearing installation	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
27	Televisi	2 buah	1 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dari dishub
28	Cctv	4 buah	1 Mutasi dari bagian pembangunan, 3 mutasi dishub
29	Alat pengaman (sinyal)	2 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
30	Meja panjang	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
31	Kursi putar	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
32	Loudspeaker	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
33	Sound system	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
34	Stabilizer/stavolt	2 buah	1 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dari dishub
35	Power supply microphone	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
36	Faximile	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
37	Microphone table stand	8 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
38	GPS	3 buah	Mutasi dari dishub
39	Sofa	1 set	Mutasi dari dishub
40	Gordyn	1 buah	Mutasi dari dishub
41	Kipas angina	1 buah	Mutasi dari dishub

42	Camera video	2 buah	Mutasi dari dishub
43	Note book	1 buah	Mutasi dari dishub
44	Peralatan computer mainframe	1 set	Mutasi dari dishub
45	Scanner	1 buah	Mutasi dari dishub
46	Radio access point	1 buah	Mutasi dari dishub
47	Antene	2 buah	Mutasi dari dishub
48	Audio cassette recorder	1 buah	Mutasi dari dishub
49	Peralatan studio visual lain-lain	1 buah	Mutasi dari dishub
50	Lensa kamera	1 buah	Mutasi dari dishub
51	Kabel listrik	1 buah	Mutasi dari dishub

1.8. Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada tahun 2018 mengelola anggaran yang bersumber dari:Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp. 11.679.662.280,00** (Sebelas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rincian Anggaran dan Realisasi APBD

Jenis Belanja		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja	
			Jumlah	%
Belanja Operasi	Belanja Pegawai	3.742.111.030	3.529.311.906	94.31
	Belanja Barang dan Jasa	2.673.673.370	2.344.328.742	87.68
Belanja Modal		5.263.877.880	5.058.751.977,81	96.10
TOTAL		11.679.662.280	10.932.392.625,81	93.60

1.9. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada PEraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan latar belakang organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organsiasi serta kondisi personil dan sarana prasarana pendukungnya.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menjelaskan secara ringkas rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2016-2021

yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan pertanggungjawaban kinerja yang terdiri dari capaian kinerja dan analisa capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, serta capaian indikator RPJMD yang didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, kendala dalam pelaksanaan serta langkah-langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab II berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
3. Rencana Anggaran Tahun 2018

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru bertanggung jawab melaksanakan misi keempat pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang tujuannya adalah melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 tahun 2016 Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi Dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Di era reformasi saat ini, penerapan teknologi informasi harus dilakukan oleh instansi pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aktivitas pelayanan kepada publik berbasis teknologi informasi biasa dikenal dengan istilah *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government sebenarnya telah didorong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang mengamanatkan setiap Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional.

Pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-government) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan kearah efektivitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah

(Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee, Government to Government).

Sebagai penjabaran dari Visi Kota Banjarbaru yaitu **“Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter”** maka Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Untuk memenuhi harapan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berperan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Visi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG HARAT (HANDAL,
AMAN, RESPONSIF DAN TERINTEGRASI)”**

Penjelasan dari Visi Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai berikut:

- Terwujudnya pelayanan publik yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) adalah terciptanya pelayanan publik di Kota Banjarbaru berbasis elektronik menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga memudahkan masyarakat
- TIK yang Harat (handal, aman, responsif dan terintegrasi) adalah teknologi yang digunakan adalah handal yang kekinian, aman sesuai standar yang ditetapkan, responsif terhadap perkembangan jaman dan terintegrasi (terhubung antara SKPD satu dengan yang lain) sehingga jadi efektif dan efisien

Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah menggunakan TIK
2. Meningkatnya konektifitas penyelenggaraan pemerintah menggunakan TIK
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah menggunakan TIK.
4. Meningkatnya kualitas layanan Informasi publik.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru selama 5 tahun anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerj a pada awal Period e RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan penyelenggaran pelayanan publik menggunakan TIK									
Misi 1 : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK										

		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Nilai Aspek SPBE	n/a	1,15	2	2,5	3	3,5	
Misi 2 : Meningkatnya konektifitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK										
		Meningkatnya konektifitas penyelenggaraan pemerintahan TIK	Prosentase unit kerja yang penyelenggaraan pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo	n/a	14%	28%	36%	53%	100%	
Misi 3 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK										
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan TIK	Prosentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo	n/a	15,62%	31,23%	46,87%	78,12%	100%	
			Prosentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	
			Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti menggunakan aplikasi LAPOR!	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	
Misi 4 : Meningkatnya kualitas layanan informasi publik										
		Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Prosentase pemberdayaan KIM	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	
			Prosentase informasi pembangunan kota Banjarbaru yang dapat diakses skala regional/nasional	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	
			Prosentase isu publik yang dijadikan bahan analisis kebijakan pimpinan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	
			Prosentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID	n/a	10%	80%	100%	100%	100%	
			Prosentase data/informasi statistik sektoral yang update	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	

Strategi Dan Kebijakan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Misi 1. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah menggunakan TIK

Strategi :

1. Pembuatan master plan TIK sebagai pedoman pengembangan TIK di Banjarbaru
2. Meningkatkan jumlah aplikasi yang terintegrasi

Kebijakan :

1. Menyiapkan dan menyediakan payung hukum yang memperkuat setiap kebijakan IT di daerah termasuk pemenuhan tuntutan transparansi layanan publik, peningkatan kualitas SDM bidang IT di SKPD dan peningkatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan masyarakat
2. Mengefektifkan komunikasi dan pengawasan terhadap SKPD yang membangun aplikasi agar sesuai dengan roadmap pengembangan aplikasi
3. Penyediaan infrastruktur TIK, media center, aplikasi pemerintahan dan domain resmi
4. Meningkatkan kualitas proses dan output yang dihasilkan oleh integrasi sarana informasi dan database SKPD untuk meningkatkan kinerja SKPD

Program :

1. Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah
2. Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

Kegiatan :

1. Perumusan Regulasi, kebijakan dan monev di bidang nama domain, sub domain, serta website dan konten
2. Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi

Misi 2. Meningkatnya konektifitas penyelenggaraan pemerintah menggunakan TIK

Strategi :

Meningkatkan dukungan dan kesadaran SKPD terhadap pengembangan IT melalui penyediaan infrastruktur IT

Kebijakan :

1. Meningkatkan jumlah jaringan radio dan fiiber optik yang terpasang dan dapat digunakan beserta pemeliharannya
2. Meningkatkan SDM bidang IT sesuai tupoksi SKPD
3. Meningkatkan kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi
4. Mengoptimalkan pengembangan data center yang memenuhi kebutuhan kedepan dan memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan publik yang transparan dan lebih baik

Program :

1. Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Peningkatan TIK
2. Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK
2. Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Dearah
3. Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis Elektronik

Misi 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menggunakan TIK

Strategi :

1. Memperkuat peran persandian dalam mengamankan informasi
2. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik
3. Meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan melalui pemanfaatan TIK dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik

Kebijakan :

1. Meningkatkan jumlah pengelola TIK yang mampu melakukan pengamanan informasi elektronik
2. Meningkatkan jumlah pengelola TIK yang mampu mengoperasikan persandian berdasarkan ISO 27001 dan indeks KAMMI secara berkelanjutan
3. Meningkatkan jumlah unit kerja terlegalisasi website dengan domain banjarbarukota.go.id
4. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui LPSE
5. Membuka layanan partisipasi, aspirasi, pengelolaan opini dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan
6. Meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan aplikasi LAPOR! Sebagai sarana pengaduan dan memproses sesuai aturan yang berlaku

Program :

1. Program Pengembangan Persandian Nasional
2. Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah

Kegiatan :

1. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian
2. Pembinaan Penyelenggaraan Persandian
3. Pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi berklasifikasi
4. Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota

Misi 4. Meningkatnya kualitas layanan informasi publik**Strategi :**

1. Memaksimalkan sumber daya komunikasi publik di daerah
2. Memperkuat fungsi PPID dan PPIDP sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi publik
3. Memperkuat fungsi statistik di daerah

Kebijakan :

1. Meningkatkan jumlah SDM KIM yang dibina secara berkelanjutan
2. Meningkatkan kerjasama dengan media komunikasi publik
3. Mendayagunakan media informasi dan komunikasi secara kreatif dan inovatif untuk menyampaikan isu-isu daerah

4. Menambah wawasan SKPD tentang UU no.14 Tahun 2008
5. Meningkatkan jumlah sosialisasi serta memaksimalkan penggunaan SIP-PPID sebagai media penyampaian informasi
6. Menyajikan informasi publik khususnya data statistik sektoral

Program :

1. Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
2. Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan :

1. Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik
2. Pengelola dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik
3. Pelayanan Permintaan Informasi Publik
4. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
5. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
6. Penyusunan Profile Daerah

2.2. Perjanjian Kinerja 2018

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 telah ditetapkan dan dimuat dalam Buku Penetapan Kinerja Kota Banjarbaru.

Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017-2021. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintah menggunakan TIK	1. Nilai Aspek SPBE	2	
Meningkatnya konektivitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Prosentase unit kerja yang penyelenggaraan pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo	28%	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	1. Prosentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo 2. Prosentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE 3. Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti menggunakan aplikasi lapor	31,25% 100% 100%	
Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	1. Prosentase perberdayaan KIM 2. Prosentase informasi pembangunan Kota Banjarbaru yang dapat diakses skala regional/nasional 3. Prosentase isu publik yang dijadikan bahan analisis kebijakan pimpinan 4. Prosentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID 5. Prosentase data/informasi statistik sektoral yang update	100% 100% 100% 100% 100%	

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mendapat dukungan dana (murni dan perubahan) sebesar **Rp. 11.679.662.280,00** (Sebelas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah). Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2018 sbb :

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
Non Program	Rp 3,328,081,031,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,076,824,595
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 120,412,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 14,400,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 30,736,800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 19,332,400
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 7,840,450
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 6,361,200
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 103,215,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 469,846,745
Penyediaan jasa non PNS	Rp 304,680,000
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 286,096,550
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 37,982,000
Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 57,717,000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Rp 30,238,500
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 56,983,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 22,188,500
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 16,674,700
Pemeliharaan gedung kantor	Rp 64,312.850
Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 11,500,000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 11,500,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 31,998,000
penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Rp 24,309,400
perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	Rp 7,688,000
Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui	Rp 5,767,918,000
Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah	Rp 343,400,000
Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center,	Rp 5,354,998,880

Disaster Recovery dan TIK	
Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi	Rp 69,520,000
Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintahan Daerah	Rp 40,000,000
Pemantauan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	Rp 40,000,000
Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah	Rp 155,112,300
Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 90,262,500
Pengelola dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik	Rp 29,804,900
Pelayanan Permintaan Informasi Publik	Rp 35,044,900
Program Pengembangan Data/Informasi	Rp 156,599,225
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	Rp 75,889,800
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 60,835,625
Penyusunan Profil Daerah	Rp 19,873,800
Program Pengembangan Persandian Nasional	Rp 107,628,000
Pembinaan Penyelenggaraan Persandian	Rp 50,260,000
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi	Rp 43,118,000
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian	Rp 14,250,000
Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah	Rp 483,613,700
Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Rp 95,000,000
Penyelenggaraan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 382,510,000
Perumusan Regulasi, Kebijakan dan Monev di Bidang nama Domain, Sub Domain serta Website dan konten	Rp 6,103,700
Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	Rp 234,290,000
Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis Elektronik	Rp 234,290,000
TOTAL	Rp 8,351,581,250



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- Bab III berisi :**
- 1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018
 - 2. Akuntabilitas Anggaran

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 sebagaimana yang telah direvisi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru bertanggung jawab melaksanakan misi keempat pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang tujuannya adalah melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2018 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang telah dibuat di tahun 2018. Dalam BAB ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2018.

3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru beserta target dan capaian realisasinya dirinci sbb :

Tabel 3.1. Target dan Capaian Sasaran Stretegis Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KET
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menggunakan TIK	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Nilai Aspek SPBE	2	1,93	96,5%	

		Meningkatnya konektifitas penyelenggaraan pemerintahan TIK	Prosentase unit kerja yang penyelenggaraan pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo	28%	42,88	153%	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan TIK	Prosentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo	31,23%	33%	105,66%	
			Prosentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE	100%	100%	100%	
			Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti menggunakan aplikasi LAPOR!	100%	100%	100%	
		Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Prosentase pemberdayaan KIM	100%	100%	100%	
			Prosentase informasi pembangunan Kota Banjarbaru yang dapat diakses skala regional/nasional	100%	100%	100%	
			Prosentase isu publik yang dijadikan bahan analisis kebijakan pimpinan	100%	100%	100%	
			Prosentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID	80%	83,33%	104,16%	
			Prosentase data/informasi statistik sektoral yang update	100%	100%	100%	

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2018 dapat dilihat pada penjelasan berikut .

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK

- Ada 1 indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pertama, yaitu :

1. Nilai Aspek SPBE

Alasan pemilihan indikator ini adalah karena dalam pelaksanaan SPBE yang bertujuan mewujudkan proses kerja yang efisien, efektifitas, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik diukur melalui nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (Maturity level) pelaksanaan SPBE. Sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan teknologi Informasi dan Komunikasi maka perlu dicapai target tingkat kematangan indikator SPBE dari aspek SPBE yang terkait hal tersebut. Di tahun 2018 target tingkat kematangan indikator SPBE dari aspek SPBE terkait adalah 2 realisasi 1,93

Dukungan anggaran dalam hal ini ada 2(dua) kegiatan yaitu

Perumusan regulasi, kebijakan dan monev di bidang nama domain, serta website dan konten adalah Rp.6.103.700 dan terealisasi Rp. Rp.5.127.500 atau 84,01% dan kegiatan Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi adalah Rp. 69.520.000 dan terealisasi Rp.26.546.000 atau 38,18%

Sasaran 2 : Meningkatnya konektifitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK

- Ada 1 indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kedua yaitu :

1. Prosentase unit kerja yang penyelenggaraan pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo

Alasan pemilihan indikator adalah karena Kebutuhan Komunikasi Data dan pengoperasian aplikasi e-government perlu didukung pengelolaan infrastruktur terpusat.

Kondisi awal di tahun 2018, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru telah terkoneksi melalui jaringan Wireless Radio LAN termasuk kantor Kecamatan. Jaringan ini pada awalnya dibangun guna mendukung penerapan SIMDA, yakni aplikasi yang digunakan untuk membantu mengelola keuangan dan aset daerah. Namun kadang-kadang koneksi tidak stabil, sehingga pekerjaan jadi terlambat dan aplikasi SIMDA tidak berjalan maksimal. Apalagi saat proses menginput RKA bersamaan, tidak bisa dilakukan di masing-masing SKPD, harus merapat ke BKAD dan dijadwal waktunya. Dalam hal koneksi internet internal SKPD, jaringan yang mendukungnya adalah Speedy yang kuota bandwithnya bervariasi.

Karena itulah, pembangunan Jaringan backbone penghubung antar gedung SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Dengan penggunaan jaringan intranet diharapkan kapasitas dan ketersediaan jaringan backbone antar gedung menjadi besar. Direncanakan akan ada pengalokasian IP Address di setiap gedung dengan menggunakan VLAN, sehingga tingkat keamanan dan ketersediaan IP address terjamin.

Pada akhir tahun 2018, 12 (dua belas) SKPD serta 20 (dua puluh) Kelurahan di Kota Banjarbaru telah terhubung dengan jaringan radio. Jadi total unit kerja yang telah terhubung dengan Diskominfo di tahun

2018 adalah 52 unit kerja dengan rincian 20 (dua puluh) SKPD terhubung dengan jaringan fiber optik sedangkan 32 (tiga puluh dua) unit kerja termasuk Kelurahan menggunakan jaringan radio. Target unit kerja yang terhubung dengan Diskominfo di tahun 2018 adalah 28% dan terealisasi 42,98%.

Anggaran untuk mendukung indikator tersebut ada 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK adalah Rp. 5.354.998.880 dan terealisasi Rp. 5.158.439.667,81 atau 96,33%, Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah adalah Rp.343.400.000 dan terealisasi Rp.322.869.488 atau 94,02% dan Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis Elektronik adalah Rp.234.290.000 dan terealisasi Rp.184.016.000 atau 78,54%

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK

- Ada 3 indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukuran keberhasilan pencapaian sasaran ketiga yaitu :

1. Prosentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo

Alasan pemilihan indikator adalah karena dengan adanya layanan persandian sehingga menjamin keamanan informasi pemerintah daerah

Sebagai upaya untuk meningkatnya kualitas layanan persandian, maka penyediaan Analisis kebutuhan persandian untuk pengamanan informasi, penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian serta pengelolaan dan perlindungan informasi. Di tahun 2018 target 20 skpd mendapat layanan persandian. Terdapat 30 SKPD yang tereduksi mengenai keamanan informasi

Dukungan anggaran untuk program Pengembangan Persandian Nasional ini adalah Rp.107.628.000 dan terealisasi Rp. Rp.48.691.250 atau 45,37% dan kegiatan Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah Rp.95.000.000 dan terealisasi Rp. 86.900.000 atau 91,47%

2. Prosentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE

Alasan pemilihan indikator adalah karena dengan penerapan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) pada setiap unit kerja diharapkan proses pengadaan barang dan jasa akan semakin cepat, akuntabel dan kredibel. Dengan keberhasilan layanan ini maka upaya melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbaisi teknologi informasi terlaksana

Targetnya, di tahun 2018 adalah 100% dan terealisasi 100% sehingga terpenuhi menunjukkan kinerja **sangat baik**

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.382.510.000 dan terealisasi Rp. Rp.356.439.760 atau 93,18%.

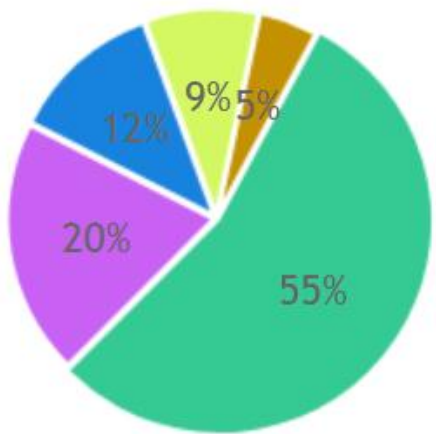
3. Prosentase tindaklanjut pengaduan oleh unit kerja yang berwenang

Alasan pemilihan indikator karena pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan pengaduan melalui penggunaan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!-SP4N) hanya akan berjalan efektif bila unit kerja yang berwenang menindaklanjuti aspirasi masyarakat, baik berupa saran maupun kritik konstruktif demi peningkatan pelayanan publik.

Di tahun 2018, Pemerintah Kota Banjarbaru menerima 246 laporan melalui aplikasi LAPOR!. **Dari 246 laporan yang telah didisposisikan ke unit kerja yang berwenang, 246 laporan telah ditindaklanjuti, sehingga target 100% tercapai.**

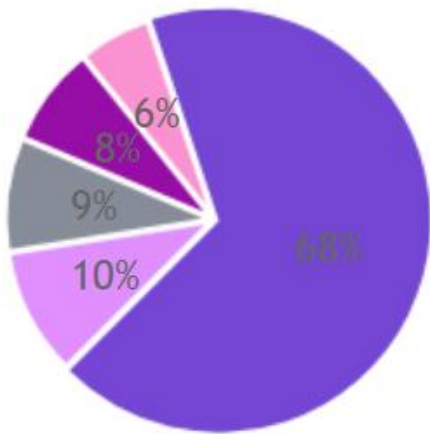
Jumlah pengguna aplikasi LAPOR! di Banjarbaru mengalami peningkatan sebesar 261,70 % dibanding tahun 2017 yang hanya menerima 94 laporan.

Berdasarkan topik, laporan yang banyak masuk melalui aplikasi LAPOR! adalah Pelayanan Masyarakat, Permintaan Informasi, Infrastruktur, Administrasi Kependudukan, Pendidikan, serta Pertanahan dan Permukiman.



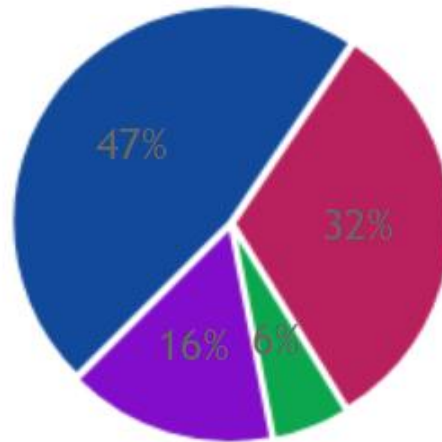
Gambar 3.1. Grafik Pengaduan masYarakat Melalui Aplikasi LAPOR!
Berdasarkan Topik Laporan

Sedangkan berdasarkan unit terlapor, maka 5 unit kerja yang banyak mendapat disposisi laporan adalah Disdukcapil, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan dan Permukiman.



Gambar 3.2. Grafik Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR!
Berdasarkan Unit Terlapor

Sedangkan bila dilihat dari sumber laporan, maka SMS masih lebih sering digunakan oleh masyarakat, diikuti oleh website, android, dan form manual.



Gambar 3.3. Grafik Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR!
Berdasarkan Sumber Laporan

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.40.000.000 dan terealisasi Rp. Rp.40.000.000 atau 100%.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan informasi publik

- Ada 5 indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keempat yaitu :

1. Prosentase pemberdayaan KIM

Alasan pemilihan indikator adalah karena pemberdayaan masyarakat dapat mempercepat proses diseminasi informasi ke masyarakat.

Sebagai upaya untuk meningkatnya kualitas layanan informasi publik, maka keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sangat penting. Di tahun 2018 target KIM yang terbina adalah 100% (5 KIM) dan hal ini terealisasi 7 KIM 140%. Adapun KIM yang telah terbentuk dan terbina di tahun 2018 adalah KIM Kampung Pesona Kasturi KIM Kampung Sayur, KIM Kampung Pelangi, KIM Kelurahan Mentaos, KIM Usaha Bersama Cempaka, KIM iKTP (industri, Kelompok Tani, Pangan) dan KIM Kampung Jamur. Capaian kinerja 100% menunjukkan **kinerja sangat baik**.

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 90.262.500 dan terealisasi 90.184.699 atau 99,91%



Gambar 3.2 KIM Kampung Pesona Kasturi

2. Prosentase informasi pembangunan kota Banjarbaru yang dapat diakses skala regional/nasional

Alasan pemilihan indikator adalah karena bisa membangun citra positif bagi pemerintah Kota Banjarbaru terkait kegiatan pembangunan dan pemerintahan semakin banyak informasi yang diterima masyarakat terkait kegiatan pembangunan maka akan semakin meningkatkan wibawa dan kesan yang bagus masyarakat terhadap pemerintah kota banjarbaru. Target kinerja di tahun 2018 adalah 100% (1 kerjasama dengan media) dan terealisasi 100%.

3. Prosentase isu publik yang dijadikan bahan analisis kebijakan pimpinan

Alasan pemilihan indikator untuk mengetahui sejauh mana program dan kebijakan pemerintah kota banjarbaru dapat memberi manfaat bagi warga masyarakat kota banjarbaru termasuk keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintah kota sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan. Target kinerja di tahun 2018 adalah 100% (1 kerjasama dengan media) dan terealisasi 100%.

4. Prosentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui SIP-PPID

Alasan pemilihan indikator karena adanya kewajiban badan publik untuk melaksanakan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah unit kerja yang telah membentuk PPIDP dibagi jumlah unit kerja lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dikali seratus. Target kinerja di tahun 2018 adalah 80% dan terealisasi 83,33%.

Berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 Bab IV Pasal 9 s/d 11, terdapat 3 jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, yaitu :

➤ **Pasal 9 (Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala)**

1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik
3. Informasi mengenai laporan keuangan dan/atau
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 BAB III Pasal 11 menjadi acuan bagi Dinas Kominfo dalam menerapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,

➤ **Pasal 10 (Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta)**

➤ **Pasal 11 (Informasi yang wajib tersedia setiap saat)**

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangananya
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik

Pada dasarnya, semua unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyediakan informasi ini, hal ini terlihat dari Daftar Informasi Publik unit kerja yang dituangkan melalui Keputusan Pimpinan Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dan salinannya telah dikumpulkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

Karena itu, capaian realisasi untuk Indikator Kinerja **"Prosentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui SIP-PPID"** dilakukan dengan memantau proses pengunggahan informasi melalui aplikasi SIP-PPID (ppid.banjarbarukota.go.id)

Jenis informasi yang menjadi target untuk disampaikan oleh unit kerja pada tahun 2018 adalah Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, terdiri dari :

1. Informasi tentang profil Badan Publik
2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
4. Ringkasan laporan keuangan (rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, daftar aset dan investasi)
5. Ringkasan laporan akses informasi publik (jumlah permohonan yang diterima, waktu yang diperlukan, jumlah permohonan yang dikabulkan, alasan penolakan informasi)
6. Informasi tentang peraturan dan/atau keputusan yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik
7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi
8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap Kantor Badan Publik

Berdasarkan informasi yang diupload oleh admin SIP-PPID pada unit kerja (data per 2 Januari 2019) didapatkan data sbb:

Tabel 3.2 Jumlah Pengunggahan pada Aplikasi SIP-PPID

No	Nama Unit Kerja	Jenis Informasi										Jumlah informasi di Aplikasi SIP-PPID	%
		Profil	Program/kegiatan	Kinerja	Lap. Keuangan	Akses Informasi	Peraturan/Keputusan	Hak dan Tata cara memperoleh informasi	Tata Cara Pengaduan	Pengumuman PBJ	Prosedur Peringatan Dini/evakuasi		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Kel. Loktabat Utara	4	16	17	3			39	1			80	60
2	Diskominfo	4	24	1	3	4	5	5	19	1		66	90
3	Inspektorat	2	38	1	22		2					65	50
4	DPMPSTP	2	3	3	6		1	49				64	60
5	Dinas Perhubungan	2	5	2	1		3	8				21	60

6	Dinas PUPR	4	9	1	4		3	2	1	2		26	80
7	Dinas Perdagangan	2	10		2			5				19	40
8	Disdaldukbpmppa	2	9	1	4				1			17	50
9	DKP3	2	10	1	1		1					15	50
10	Kel. Gt. Payung	3	3		1			6				13	40
11	Dinas Lingkungan Hidup	2	4	1	5		1					13	50
12	BPBD	2	3	1	1					1		8	50
13	RSDI	1	2	2	5							10	40
14	Kel. Komet	2	7	1								10	30
15	Dinas Kesehatan	1	4	1	4							10	40
16	Disporabudpar	1	1	3			1					6	30
17	Kesbangpol		1	1			5					7	30
18	Kec. Banjarbaru Selatan	2	5	1	1			1	1			11	60
19	Kel. Mentaos	5			1		1	1	1			9	50
20	Kel. Landasan Ulin Tengah	3	2					1				6	30
21	Kel. Landasan Ulin Selatan	3	6	1	1	1	1	1				14	70
22	Kel. Gt. Manggis	6										6	10
23	Kec. Banjarbaru Utara	2	7	1	1			1				12	50
24	Kel. Syamsudinnoor	3	1	1	9	1		1				16	60
25	Kel. Sungai Ulin	2	3									5	20
26	Kel. Sungai Tiung	1	2	1								4	30
27	Kel. Loktabat Selatan	1						1				2	20
28	Kel. Landasan Ulin Utara	6	1									7	20
29	BPKAD	2	1				1					4	30
30	BAPPEDA			1	2		1					4	30
31	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	1	1									2	20
32	Dinas Perkim	2	2	1	3	2		6				16	60
33	Kec. Landasan Ulin	2	1									3	20
34	BPPRD	1		1	3			1				6	40
35	Kel. Sungai Besar	2	1									3	20
36	Kel. Palam	9	1			4			1			15	40
37	Kel. Landasan Ulin Timur	3	2		1	1						7	40
38	Kel. Gt. Paikat	1										1	10
39	Kel. Cempaka	2	10	2	2	2	1					19	60
40	Kec. Cempaka	1										1	10
41	Satpolpp	1	7				1					9	30
42	BKPP	4						9				13	20
43	Sekretariat DPRD						1					1	10
44	Kel. Landasan Ulin Barat											0	0
45	Kel. Kemuning											0	0
46	Kel. Bangkal											0	0
47	Kec. Liang Anggang	8	4									12	20
48	Dukcapil											0	0
49	Diskopukmnaker	1	2	3	1		1					8	50
50	Dinas Pendidikan		12	3			4					19	30
51	Dinas Sosial											0	0
52	SETDAKO												60
	a) Bagian umum setdako											0	
	b) Bagian organisasi											0	

	setdako												
	c) Bagian pemerintahan setdako											0	
	d) Bagian Kerjasama setdako											0	
	e) Bagian Humas dan Protokol Setdako											0	
	f) Bagian Ekobang setdako		21									21	
	g) Bagian Kesra setdako	1	3									4	
	h) Bagian Hukum setdako						3					3	
	i) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	7				1		1		11	
RATA-RATA PROSENTASE INFORMASI PUBLIK YANG DISAMPAIKAN UNIT KERJA												35.96	

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata prosentase informasi publik yang disampaikan oleh unit kerja bila dibandingkan dengan Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 adalah 35,96%

Berdasarkan tabel diatas pula terlihat, bahwa dari 60 unit kerja yang telah membentuk PPIDP (31 SKPD, 20 Kelurahan dan 9 Bagian pada Setdako), hanya tersisa 10 unit kerja yang belum mengunggah informasi yang dimiliki ke aplikasi SIP-PPID, yaitu :

- 1. Kelurahan Landasan Ulin Barat
- 2. Kelurahan Kemuning
- 3. Kelurahan Bangkal
- 4. Disdukcapil
- 5. Dinas Sosial
- 6. Bagian Umum Setdako
- 7. Bagian Organisasi
- 8. Bagian Pemerintahan
- 9. Bagian Kerjasama
- 10. Bagian Humas dan Protokol.

Sehingga capaian di tahun 2018 adalah 83,33%. Hal ini diatas target yang telah ditetapkan di tahun 2018 yaitu 80%, sehingga kinerja Diskominfo untuk kegiatan ini pada tahun 2018 sebesar 104.16%
Dukungan anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 35.044.900 dan terealisasi Rp. 34.944.900 atau 99,71%

5. Prosentase data/informasi statistik sektoral yang update

Alasan pemilihan indikator karena publikasi statistik daerah merupakan alat ukur pembangunan di daerah. Keberhasilan kegiatan ini dilihat dari ketersediaan Buku Statistik Kota Banjarbaru dan PDRB.

Pada Tahun 2018, capaian kinerja adalah 100% yang menunjukkan **kinerja sangat baik**.

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 156.599.225 dan terealisasi Rp. 156.599.000 atau 99,99%

Selain indikator kinerja utama sebagaimana dijelaskan diatas, Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru juga dapat dilihat dari beberapa indikator lainnya

1. Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi

Target pemenuhan layanan administrasi perkantoran di tahun 2018 adalah 100% dan terealisasi 100%, baik dalam penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi, SDA, dan listrik, jasa kebersihan, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan, makanan dan minuman, rapat koordinasi serta penyediaan jasa non PNS. Capaian kinerja 100% menunjukkan kinerja **sangat baik**.

2. Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi sesuai standar Permendagri Nomor 7 Tahun 2006

Target pemenuhan sarana dan prasarana aparatur adalah 100% dan terealisasi 100%. Realisasi diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan mobil/kendaraan dinas, gedung kantor yang sudah direhab/diperbaiki, tersedianya meubeler, serta perlengkapan dan peralatan kantor lainnya sesuai permendagri Nomor 7 Tahun 2006. Capaian kinerja 100% menunjukkan kinerja **sangat baik**.

3. Jumlah temuan dari BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Target temuan dari BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti adalah 100% dan hal ini telah terealisasi 100%. Capaian kinerja 100% menunjukkan kinerja **sangat baik**.

3.2. Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Dinas Informatika Kota Banjarbaru pada tahun 2018 sebesar 93,40 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja dan Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA (2018)			ANGGARAN			KE T
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan TIK	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Nilai Aspek SPBE	2	1,93	96,5%	Rp. 75.623.700	Rp.31.673.500	41,88%	
		Meningkatnya konektivitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Prosentase Unit Kerja yang penyelenggaraan pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo	28%	42,98%	153%	Rp.5.932.688.880	Rp.5.665.325.155,81	95,49%.	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Prosentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo	31,23%	33%	105%	Rp. 202.628.000	Rp. 135.591.250	66,92%	
			Prosentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE	100%	100%	100%	Rp. 221.438,500	Rp. 217.471.500	98,21%	
			Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti menggunakan aplikasi LAPOR!	100%	100%	100%	Rp. 40.000.000	Rp. Rp. 40.000.000	100%.	
		Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Prosentase pemerbadayaan KIM	30%	100%	100%	Rp. 90.262.500	Rp. 90.184.669	99,91%.	
			Prosentase informasi pembangunan kota banjarbaru yang didapat diakses skala regional/nasional	1	1	100%	Rp. 29.804.000	Rp. 29.781.150	99,92%	
			Prosentase isu publik yang dijadikan bahan analisis kebijakan pimpinan	100%	100%	100%				
			Prosentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID	80%	83,33%	104%	Rp 35.044.900	Rp.34.944.900	99,71%	
			Prosentase data/informasi statistik sektoral yang update	100%	100%	100%	Rp.156.599.225	Rp.156.599.000.	99,99%	

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SALDO	%
Non Program	Rp 3,328,081,030	Rp 3,160,981,906	Rp 167,099,124	94.98%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,076,824,595	Rp 801,375,960	Rp 182,525,920	74.42%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 120,412,000	Rp 86,886,616	Rp 31,991,615	72,16%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 14,400,000	Rp 14,400,000	Rp -	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 30,736,800	Rp 30,666,800	Rp 70,000	99,77%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 19,332,400	Rp 18,907,000	Rp 425,400	97.79%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Rp 7,840,450	Rp 7,829,000	Rp 11,450	99.85%

kantor				
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 6,361,200	Rp 6,208,000	Rp 153,200	97.59%
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 103,215,000	Rp 95,955,000	Rp 7,260,000	92.96%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 469,846,745	Rp 394,029,658	Rp 75,817,087	83.86%
Penyediaan jasa non PNS	Rp 304,680,000	Rp 290,630,000	Rp 14,050,000	95.38%
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 286,096,550	Rp 243,618,131	Rp 42,478,419	85,15%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 37,982,000	Rp 31,710,000	Rp 3,572,000	83.49%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 57,717,000	Rp 53,808,100	Rp 3,908,000	93.23%
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Rp 30,238,500	Rp 25,711,300	Rp 4,527,200	85.03%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 56,983,000	Rp 33,038,731	Rp 23,944,269	57.98%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 22,188,500	Rp 22,100,000	Rp 228,500	99.60%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 16,674,700	Rp 14,200,000	Rp 2,474,000	85.16%
Pemeliharaan gedung kantor	Rp 64,312,850	Rp 63,050,000	Rp 1,262,800	89.04%
Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 11,500,000	Rp 11,500,000	Rp -	100%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 11,500,000	Rp 11,500,000	Rp -	100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 31,998,000	Rp 30,485,100	Rp 1,512,900	95,27%
penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Rp 24,309,400	Rp 22,796,500	Rp 1,134,900	93.78%
perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	Rp 7,688,600	Rp 7,688,600	Rp -	91.58%
Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	Rp 5,767,918,880	Rp 5,507,855,155.81	Rp 260,063,724.19x	95,49%
Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah daerah	Rp 343,400,000	Rp 322,869,488	Rp 20,530,512	94.02%
Penyelenggaraan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery dan TIK	Rp 5,354,998,880	Rp 5,158,439,667,81	Rp 196,559,213,19	96.32%
Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi	Rp 69,520,000	Rp 26,546,000	Rp 42,974,000	38.18%
Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000	Rp -	100%
Pemantauan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000	Rp -	100%
Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Rp 155,112,300	Rp 154,910,749	Rp 201,352	99,87%
Fasilitas dan Konsultasi Sumber daya komunikasi publik	Rp 90,262,500	Rp 90,184,699	Rp 77,601	99.91%
Pengelola dan pemetaan saluran komunikasi publik	Rp 29,804,900	Rp 29,781,150	Rp 23,750	99.92%
Pelayanan permintaan informasi publik	Rp 35,044,900	Rp 34,944,900	Rp 100,000	99.71%
program pengembangan data/informasi	Rp 156,599,225	Rp 156,599,000	Rp 225	99,99%
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Rp 75,889,800	Rp 75,889,800	Rp -	100%
penyusunan dan analisis data /informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Rp 60,835,625	Rp 60,835,400	Rp 225	99.99%
penyusunan profil daerah	Rp 19,873,800	Rp 19,873,800	Rp -	100%
Program Pengembangan Persandian Nasional	Rp 107,628,000	Rp 48,691,250	Rp 58,936,750	45,24%
pembinaan penyelenggaraan persandian	Rp 50,260,000	Rp 19,105,250	Rp 31,154,750	38.01%
pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi berklasifikasi	Rp 43,118,000	Rp 22,622,000	Rp 20,496,000	52.46%
perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian	Rp 14,613,000	Rp 6,964,000	Rp 7,286,000	47.65%
Program layanan penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah	Rp 483,613,700	Rp 448,467,260	Rp 35,146,440	92.73%
penyelenggaraan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah	Rp 95,000,000	Rp 86,900,000	Rp 8,100,000	91.47%

penyelenggaraan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota	Rp 382,510,000	Rp 356,439,760	Rp 26,070,240	93.18%
Perumusan regulasi, kebijakan dan monev di bidang naman domain, sub domain serta website dan konten	Rp 6,103,700	Rp 5,127,500	Rp 976,200	84,01%
Program layanan Peningkatan kualitas layanan publik Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan TIK	Rp 234,290,000	Rp 184,016,000	Rp 51,274,000	78,54%
Promosi dan Sosialisasi layanan publik berbasis elektronik	Rp 234,290,000	Rp 184,016,000	Rp 51,274,000	78,54%
TOTAL	Rp 11,679,662,280	Rp 10,932,392,625.81	Rp 747,229,954,19	93,60%

BAB IV

PENUTUP

Bab IV berisi :

1. Kesimpulan
2. Kendala dan Solusi

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada

Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun pertama dari Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Kota Banjarbaru tahun 2016-2021.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran maka pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 dapat berjalan dengan baik.

Beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dalam pencapaian sasaran memang ada yang belum dapat terealisasi atau masih dibawah target. Namun beberapa indikator kinerja yang lain realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan yang dicapai tentunya tidak terlepas dari kerja sama yang baik dan partisipasi semua pihak. Untuk target-target yang belum tercapai di tahun ini perlu dicarikan solusi agar dapat direalisasikan pada tahun berikutnya.

Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 11,679,662,280** yang dialokasikan untuk 11 program dan non program serta 37 kegiatan. Penyerapan anggaran di tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 10,932,392,625,81** atau 93,60%

Penyerapan anggaran terendah ada pada Program Pengembangan Persandian Nasional pada kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Persandian sebesar 38,01% dan penyerapan anggaran tertinggi adalah 100% pada program Layanan Penyediaan informasi publik Pemerintah Daerah, kegiatan Pemantauan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat.

Dari dua sasaran yang ditetapkan, terdapat lima indikator kinerja utama (IKU) yang dipilih sebagai tolak ukur. Indikator Kinerja Utama yang mencapai dan atau melebihi target realisasi adalah :

1. Prosentase unit kerja yang penyelenggaraan pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo (153%)

2. Prosentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID (104%)
3. Prosentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo (105%)

4.2. Kendala dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi di tahun 2018 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada kegiatan **penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**, penyerapan anggaran 72,16%. Hal ini karena pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulannya tidak dapat diprediksi. Pada kegiatan ini terdapat nilai efisiensi sebesar 27,84%.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kendala :

Pada kegiatan **pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional** penyerapan anggaran hanya 57,98%. Hal ini disebabkan karena kerusakan tidak dapat diprediksi, sedangkan pemeliharaan sudah di realisasikan.

Solusi :

Sering mengecek kendaraan dinas/operasional agar bisa lebih terawat dan terpelihara.

3. Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui pemanfaatan TIK

Pada kegiatan **Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi**, penyerapan anggaran 38,18%.

Kendala :

Yang paling mempengaruhi capaian keuangan kegiatan kurang dari 50% adalah:

- Belum terbentuknya Tim SPBE sehingga anggaran honor dan makan minum penunjang kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan Tim SPBE tidak digunakan hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dalam rencana pembentukan Tim tersebut.
- Untuk belanja modal perangkat aplikasi mobile tidak digunakan karena pagu yang dianggarkan tidak memenuhi harga pasaran perangkat

aplikasi mobile yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan

Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan :

- Meningkatkan kordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan pembentukan Tim SPBE.
- Melakukan survey harga dan ketersediaan perangkat yang dibutuhkan sebelum menganggarkan keuangan.

4. Program Pengembangan Persandian Nasional

Kendala :

Pada **Program Pengembangan Persandian Nasional** penyerapan anggaran hanya 45,24% hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat kendala penyesuaian jadwal operasional dengan kegiatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingat instansi tersebut baru saja berubah nama dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada awal tahun 2018, jadi banyak penjadwalan pelaksanaan sosialisasi yang terbentur dengan daerah lain se Indonesia dan juga mengenai pembiayaan Perjalanan Dinas Narasumber yang dibebankan ke daerah sedangkan untuk pembiayaan di daerah terbatas serta keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM di bidang Keamanan Informasi

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Persandian 38,01%, kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi berklasifikasi 52,46% dan kegiatan perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian 47,65%.

Solusi :

1. Mengintensifkan koordinasi dengan instansi vertikal pengampu bidang persandian BSSN dan konsul dengan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten lain
2. Menambah SDM terkait bidang persandian dalam rangka pengamanan Informasi bisa melalui pengiriman peserta diklat atau pengadaan SDM yang berkualifikasi bidang persandian dalam rangka pengamanan informasi.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.